

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Hubungan dan kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia telah melalui proses yang sangat panjang. Kerjasama ini lebih mengedepankan misi kemanusiaan tersebut cukup berhasil dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, karena tujuan dari kerjasama tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan kedua belah pihak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berperan juga sebagai fasilitator dalam hubungan kerjasama tersebut telah mampu mengemban tugas dan fungsinya baik sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia maupun kapasitasnya sebagai actor pelaksanaan di daerah dan sebagai mediator yang senantiasa berupaya menjaga keseimbangan disertai kebijakan yang tidak menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku.

Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia terbentuk atas dasar kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu yaitu; Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kepentingan mengatasi masalah kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Timur yang bertujuan meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan di Kalimantan Timur. Sedangkan

tentang kualitas kesehatan dan pendidikan di Indonesia yang juga bertujuan meningkatkan Kesehatan dan pendidikan di Indonesia.

Dengan ketentuan perundangan di Negara Republik Indonesia, Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia harus mengikuti mekanisme yang berlaku yaitu mekanisme daerah, mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Dan dari mekanisme tersebut menghasilkan sebuah proses kerjasama yang meliputi tahap peninjauan, tahap penyusunan dan penandatanganan LoI, tahap persetujuan DPRD, penyusunan Draft MoU dan persetujuan Draft MoU, penandatanganan Draft MoU, dan kemudian Pelaksanaan Kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia.

Akhirnya kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia secara resmi terbentuk dengan dicapainya kesepakatan yang dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU) oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak dengan Vice – Chancellor Universitas Adelaide Australia Professor John Taplin, pada tanggal 22 Maret 2011, yang merupakan dokumen perjanjian yang sah dan formal sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama.

Berdasarkan MoU tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Adelaide menghasilkan kerjasama dibidang kesehatan meliputi, Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang Kesehatan, Membantu mengadakan Puskesmas Percontohan di tian Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, mengadakan

penelitian untuk masalah-masalah kesehatan yang berkembang di Kalimantan Timur, dan mengirimkan bantuan tenaga medis sebagai pembimbing kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan. Dan dibidang pendidikan meliputi pengadaan program pelatihan kembali untuk guru-guru yang sudah ada dengan cara Pelatihan Proses Pembelajaran (Subject delivery), mengadakan Pendidikan formal lanjutan (S2 atau S3), membantu Pendidikan untuk calon-calon guru (Mahasiswa S1) yang akan menjadi guru secara Sandwich Program dengan pemagangan di sekolah-sekolah negeri di Adelaide Australia, mengadakan penelitian tentang proses pembelajaran di Kalimantan Timur, mengadakan beasiswa ALA Fellowship, dan membantu meningkatkan Taraf sekolah di Kalimantan Timur menjadi bertaraf internasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitator dalam hubungan kerjasama tersebut telah mampu mengemban tugas dan fungsinya baik sebagai wakil dari Pemerintah RI maupun kapasitasnya sebagai aktor pelaksana di daerah dan sebagai mediator yang senantiasa berupaya menjaga keseimbangan disertai kebijakan yang tidak menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku.

Apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia menjadi sebuah bukti konkrit tentang eratnya hubungan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia yang telah terjalin sekian lama. Jika dikaitkan dengan pemberlakuan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan

Universitas Adelaide Australia tersebut merupakan bentuk perwujudan nyata dari

konsep-konsep otonomi daerah. Konsep otonomi daerah telah memposisikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaku birokrasi pemerintahan negara lebih mampu melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan bidang Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur melalui kerjasama dengan pihak manca negara merupakan tindakan konkrit sebagaimana dimaksudkan dalam otonomi daerah. Dan dari proses kerjasama tersebut akan mempunyai tujuan yang menjadi harapan masyarakat Kalimantan Timur yaitu meningkatkan Kualitas Kesehatan dan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, yang dpt promosikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur yang terus berkembang dan